



LHP BPK SEMESTER II TAHUN 2012

Temuan Potensi Kerugian Negara Hampir Rp985 M

Temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI semester II Tahun 2012 di seluruh Kalimantan Barat hampir mencapai 3.100 temuan. Dari 236 temuan pada delapan entitas, potensi kerugian negara menunjukkan angka fantastis. Jumlahnya hampir mencapai Rp985 miliar dan USD21 juta.



COVER STORY

POTENSI kerugian negara itu terungkap saat kunjungan kerja Panitia Akuntabilitas Publik (PAP) DPD. Panitia tersebut meminta klarifikasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan semester II tahun 2012 kepada Pemerintah Provinsi Kalbar maupun pemerintah kabupaten dan kota, Kamis (5/9).

“Jumlah yang disetor kembali kepada negara Rp293 miliar. Pertanggungjawaban yang harus diperbaiki dan jika tidak diperbaiki harus disetor kepada negara hampir Rp700 miliar dan USD21 juta. Jadi totalnya hampir Rp985 miliar ditambah USD21 juta,” ujar Ketua PAP, Farouk Muhammad dalam kunjungan kerja PAP DPD RI dalam rangka menindaklanjuti pemeriksaan BPK semester II Tahun 2012 di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, kemarin.

◆ Ke Halaman 7 kolom 1



Temuan Potensi Kerugian Negara Hampir Rp985 M

Sambungan dari halaman 1

Hadir juga dalam kunjungan kerja tersebut anggota PAP lainnya, yakni Hairiah, Husein Effendi, Sarrah Lerry, Jacob Jack S, Iskandar Muda Baharudin Lopa, Denty Eka Pratiwi, Budi D, Yuan RS, AM Fatwa, dan Hardy Salamat. Seluruh anggota dibagi atas tiga kelompok. Setiap kelompok meminta klarifikasi pada beberapa daerah.

Farouk menjelaskan sebanyak dua kali dalam setahun BPK RI memberikan laporan kepada pihaknya terkait laporan hasil pemeriksaan keuangan atas pelaksanaan APBN provinsi maupun kabupaten dan kota. "Makanya kita juga turun ke Kalbar," jelas Farouk.

Menurut Farouk, ada dua mekanisme yang digunakan untuk meminta klarifikasi, yakni rapat kerja dan korespondensi. Di Kalbar, rapat kerja dilaksanakan dengan Pemerintah Provinsi Kalbar dan tujuh kabupaten kota, yakni Bengkayang, Kayong Utara, Ketapang, Melawi, Sintang, Kota Pontianak, dan Sekadau. Kabupaten dan kota tersebut dipilih karena dianggap menonjol. Sedangkan kabupaten dan kota lainnya secara korespondensi. Klarifikasi ini terkait sejauh mana temuan-temuan sudah ditindaklanjuti.

"Dari semua temuan BPK (di Kalbar) yang sebanyak 3.100 temuan, *kan* tidak bisa semuanya. Kami agak selektif dan lebih fokus tentang kedisiplinan dan kepatuhan terhadap peraturan. Ada 236 temuan di delapan entitas," ungkap Farouk.

Setelah diklarifikasi langsung kepada pemprov maupun kabupaten dan kota, ternyata ada yang sudah diselesaikan tetapi BPK belum menerima klarifikasinya, dan ada juga yang masuk ke proses hukum. Salah satunya, lanjut Farouk, di Pemerintah Provinsi Kalbar. Jumlah yang harus disetor kembali kepada negara mencapai Rp200 miliar.

Pertanggungjawaban yang harus diperbaiki atau konsekuensi setor kembali kepada negara sebesar Rp420 miliar plus USD21 juta. Temuan-temuan tersebut telah ditindaklanjuti. "Yang belum ada Rp100 miliar. Ini pun pada umumnya beda penafsiran antara objek eksekutif dan BPK," katanya.

Farouk berharap daerah-daerah yang belum membereskan temuan BPK tersebut agar segera menyelesaikannya. "Kalau memang pidana dan perdata, ya harus dilalui. Cepat klarifikasi," katanya. Ia juga meminta seluruh pemerintah baik tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota agar lebih tertib dalam penyusunan laporan keuangannya, sehingga permasalahan dan temuan tidak terjadi berulang kali.

Anggota PAP, Sarah Lerry, menuturkan Pemerintah Kabupaten Melawi mendapat rekomendasi dengan angka signifikan. "Melawi signifikan temuan BPK-nya dari seluruh kabupaten. Per 30 Juli 2003, menurut catatan kami, sebanyak Rp22 miliar belum sesuai aturan. Paling besar pada 2008 mencapai Rp12 miliar," ungkap Sarah.

Sarah menjelaskan berdasarkan klarifikasi dari perwakilan Pemerintah Kabupaten Melawi kemarin, ada beberapa temuan yang seharusnya dibawa ke jalur hukum karena melibatkan pihak ketiga dan angkanya cukup signifikan. "Pada entitas tadi, mereka kesulitan sehingga perlu proses hukum," katanya.

Modus-modus dalam temuan tersebut diantaranya banyak dana bantuan sosial dan alokasi dana desa yang tidak pertanggungjawabkan. Alasannya klasik, yakni kepala desa tidak memiliki kapasitas. "Yang kami heran, kan ada PMD yang bertugas mendampingi kepala desa untuk mempertanggungjawabkan," katanya.

Sarah mengungkapkan di

Kabupaten Melawi, total yang ditindaklanjuti tetapi belum sesuai hampir Rp21 miliar, sedangkan Bengkayang Rp14 miliar. Dari temuan tersebut, ada pihak ketiga, dana bansos, dan dana alokasi pendidikan.

Anggota DPD, Hariah menuturkan kelompoknya meminta klarifikasi Kota Pontianak. Menurutnya, Kota Pontianak hampir sama dengan kabupaten lainnya. Permasalahan terjadi pada bantuan sosial tahun 2006, 2007, dan 2008. Dana bansos pada tahun tersebut masuk ke ranah hukum dan tinggal menunggu proses. "Rp16 miliar tidak sesuai peruntukkannya dan pengembaliannya baru Rp999,5 juta," katanya.

Temuan lainnya berupa realisasi dana bansos Rp1,7 miliar untuk menutupi pengeluaran kas yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Selain itu, ada ketekoran kas Rp5 miliar dan baru dikembalikan oleh anggota DPRD Kota Pontianak periode lalu sebesar Rp49 juta. "Dana bansos yang tidak sampai kepada penerima bantuan baru dikembalikan Rp250 ribu. Kalau 2009 ke atas sudah diselesaikan," ujarnya.

Kepala BPK Perwakilan Kalbar Adi Sudibyو mengungkapkan temuan-temuan yang ada saat ini masih temuan lama. "Akan diproses dan dikomunikasikan dengan daerah," katanya. Ia menjelaskan pada semester II tahun anggaran 2012 terdapat 2.976 rekomendasi dan 6.306 rekomendasi di Kalbar. Dari sejumlah rekomendasi tersebut, yang sudah ditindaklanjuti sebanyak 3.975 rekomendasi. "Masih dalam proses dan masih dibahas 1.799 rekomendasi dan yang belum 532 rekomendasi," ujar Adi.

Adi menjelaskan rekomendasi yang sulit ditindaklanjuti akan dimasukkan dalam kategori tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah. "Jadi 27 persen masih dalam

proses tindak lanjut, bisa sesuai rekomendasi atau bisa tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah. Sebanyak 6,52 persen belum ditindaklanjuti," jelasnya.

Menurut Adi, masih ada kabupaten yang tindak lanjut terhadap temuan BPK belum mencapai 50 persen, yakni Melawi dan Ketapang. Kedua daerah tersebut telah berkoordinasi dengan BPK. "Tetapi semua ini kan tergantung dari komitmen daerah," katanya. Kayong Utara merupakan salah satu daerah yang diminta klarifikasi atas temuan BPK oleh PAP DPD RI. Saat ditemui di Kantor Gubernur Kalbar, kemarin, Bupati Kayong Utara, Hildi Hamid menuturkan ia telah menunjukkan wakil bupati untuk mengikuti pertemuan bersama DPD RI tersebut. "Saya ke sini untuk rapat CPNS," katanya.

Saat dikonfirmasi terkait temuan di kabupatennya, Hildi menjelaskan dirinya telah membentuk Tim Penyelesaian Ganti Rugi. "Wakil Bupati bersama Kepala Inspektorat dan Dinas Keuangan saya tugaskan," ujarnya.

Menurut Hildi, temuan paling banyak di kabupatennya pada tahun 2008. Temuan ini melibatkan pihak ketiga, termasuk kontraktor. Temuan berupa pembayaran pajak. Ada beberapa kontraktor yang belum melunasi pajak. Persoalannya, lanjut Hildi, ketika itu Bank Kalbar di sana belum online dan belum bisa menerima pembayaran pajak.

"Sehingga yang mestinya membayar, belum melunas-kannya. Ada juga yang kelebihan bayar. Ini tetap menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah," katanya. Hildi menambahkan pihaknya telah mengirimkan surat peringatan kepada pihak ketiga, jika tidak dibereskan akan lanjut ke tindakan hukum. "Temuan bansos tidak ada. Pengadaan itu banyak oleh pihak ketiga," katanya. (uni)